

Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Arif Wicaksa¹, Ailsa P. S. Laksono², Aisyah³

¹Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia (Email: arif.wicaksa@lecturer.unri.ac.id)

²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia (Email: ailsapurwa@gmail.com)

³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia (Email: aisyah.aisyah@fisip.unmul.ac.id)

ABSTRACT

This study describes the factors inhibiting the optimization of Indonesia's interests within the ASEAN Economic Community (AEC), employing Keohane and Nye's theoretical framework of Asymmetric Interdependence. Utilizing a qualitative library research method, the study examines Indonesia's position across four key areas: trade structure, investment flows, skilled labor mobility, and integration into Global Value Chains (GVCs). The findings reveal that Indonesia's relationship with fellow MEA member states is fundamentally asymmetrical. Indonesia remains locked into the role of a raw material supplier, a destination for extractive-consumptive investment, and an exporter of informal labor, while simultaneously being a net importer of high-value manufactured goods, a user of foreign skilled labor, and a consumer of final products. This pattern creates long-term structural vulnerabilities, weakens Indonesia's bargaining position, and hinders its economic transformation. The study concludes that Asymmetric Interdependence is a fundamental inhibiting factor that constrains Indonesia's ability to optimally leverage the MEA, necessitating strategic and long-term-oriented corrective policies.

Keywords: MEA, Indonesia, Asymmetrical Interdependence, Economic Relations

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor penghambat optimalisasi kepentingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan menggunakan kerangka teori *Asymmetric Interdependence* dari Keohane dan Nye. Melalui metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini menguji posisi Indonesia dalam empat bidang utama: struktur perdagangan, arus investasi, mobilitas tenaga kerja terampil, dan integrasi rantai pasok global (Global Value Chains). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota MEA lainnya bersifat asimetris. Indonesia cenderung terkunci dalam peran sebagai pemasok bahan baku, penerima investasi ekstraktif-konsumtif, dan pengeksport tenaga kerja informal, sementara menjadi pengimpor produk manufaktur bernilai tinggi, pengguna tenaga kerja terampil asing, dan konsumen produk akhir. Pola ini menciptakan kerentanan struktural jangka panjang, memperlemah posisi tawar Indonesia, dan

menghambat transformasi ekonominya. Disimpulkan bahwa interdependensi asimetris merupakan faktor penghambat fundamental yang membatasi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan MEA secara optimal, sehingga memerlukan kebijakan korektif yang strategis dan berorientasi jangka panjang

Kata Kunci: MEA, Indonesia, Interdependensi Asimetris, Hubungan Ekonomi

PENDAHULUAN

Perhelatan integrasi ekonomi regional mencapai momen bersejarahnya di kawasan Asia Tenggara dengan resmi dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Cita-cita besar yang tertuang dalam MEA Blueprint 2025 adalah menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi penuh, sangat kompetitif, dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi secara global (ASEAN, 2015; Rahadi, 2016). Karakter utama dari integrasi ini diwujudkan melalui lima arus bebas (*five freedoms of flow*), yaitu barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil (Wardoyo, 2017). Secara teoritis, penghapusan hambatan-hambatan ini dirancang untuk menciptakan efisiensi ekonomi, memperdalam rantai pasok regional (Wardoyo, 2017), dan pada akhirnya meningkatkan daya saing kolektif ASEAN di panggung ekonomi global.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar, populasi terbesar, dan wilayah geografis paling luas di ASEAN, Indonesia secara natural diharapkan menjadi pemain utama dan penerima manfaat (*primary beneficiary*) terbesar dari integrasi MEA. Potensi keuntungannya sangat signifikan; dari perluasan pasar bagi produk manufaktur dan UMKM, peningkatan arus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), hingga transfer teknologi dan pengetahuan. Ekspektasi bahwa Indonesia akan menjadi "pemenang" dalam skema MEA pun kerap mengemuka dalam berbagai diskursus kebijakan. (Wardoyo, 2017; Herdiansah, 2017; Evelina dan Lie, 2025)

Namun, setelah hampir satu dekade perjalanan MEA (mendekati tahap akhir MEA

Blueprint 2025), realitas yang terungkap justru menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bukti-bukti empiris mengindikasikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan kepentingan nasional dalam kerangka MEA. Kontradiksi pertama terlihat dalam pasar tenaga kerja terampil. Alih-alih menjadi pengekspor utama tenaga kerja profesional, Indonesia justru mengalami defisit dalam mobilitas tenaga kerja terampil. Rendahnya penyerapan pekerja terampil Indonesia ke negara-negara ASEAN lain disebabkan oleh faktor kompetensi, penguasaan bahasa, dan pengakuan sertifikasi berbanding terbalik dengan masifnya arus tenaga kerja terampil asing (seperti dari Malaysia, Singapura, dan Thailand) yang masuk ke Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis. (Apresian, 2016; Haryati, Lupikawaty, dan Yahya, 2019)

Kontradiksi kedua terletak pada struktur ekonomi. Meskipun MEA dirancang untuk mendorong industrialisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam dan ekonomi ekstraktif. Ekspor masih didominasi oleh komoditas mentah dan setengah jadi, sementara sektor manufaktur, khususnya yang berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi, masih kesulitan untuk bersaing dan berkembang secara signifikan dalam pasar regional yang sangat kompetitif. (Hermana, dkk., 2025; Evelina dan Lie, 2025)

Fenomena-fenomena paradoksal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang sistemik, yang membuat Indonesia tidak mampu mencerna peluang MEA secara optimal. Oleh karena itu,

penelitian ini hadir dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis faktor-faktor fundamental apa saja yang menghambat optimalisasi pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menelaah akar permasalahan ini, penelitian ini tidak hanya berusaha memberikan diagnosis yang komprehensif atas kondisi yang ada, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan strategis bagi Indonesia dalam menghadapi fase integrasi ekonomi regional berikutnya. bisa menjadi pemain utama yang mengambil manfaat paling besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk memetakan lanskap akademik dan mengidentifikasi celah penelitian yang akan diisi oleh tulisan ini. Kajian terhadap literatur yang ada mengungkap tiga kelompok perspektif utama dalam menganalisis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari sudut pandang Indonesia.

Pertama, sejumlah literatur menekankan pada potensi dan manfaat positif MEA. Apresian (2016), dalam artikelnya berjudul “Arus Bebas Tenaga Kerja dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN: Ancaman bagi Indonesia?”, menganalisis MEA melalui lensa liberal-institusional. Ia berargumen bahwa kekhawatiran domestik atas membanjirnya tenaga kerja asing tidak sepenuhnya berdasar. Data yang ia sajikan justru menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia lebih agresif mencari pekerjaan di negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura, dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri melebihi jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Namun, Apresian sendiri mengakui adanya masalah kualitas: mayoritas tenaga kerja Indonesia yang terserap masih terkonsentrasi pada sektor informal dan teknis, dengan partisipasi yang sangat minim di level manajerial dan profesional. Temuan ini sesungguhnya telah menyentuh pada gejala asimetri, meski tidak dianalisis lebih lanjut,

yaitu asimetri kualitatif dalam mobilitas tenaga kerja terampil dimana Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

Kedua, terdapat penelitian yang mengonfirmasi manfaat ekonomi makro MEA namun mengabaikan struktur hubungan yang timpang. Hermana dkk (2025) dalam “Dampak MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi” menyimpulkan bahwa MEA berdampak positif bagi Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan ekspor, investasi asing, dan pengembangan UMKM. Mereka mencatat pola perdagangan dimana Indonesia mengeksport komoditas mentah (seperti kopi dan rempah) dan mengimpor produk manufaktur serta barang modal dari negara-negara ASEAN lainnya. Meski menyajikan data pertumbuhan, analisis Hermana dkk. gagal mengkritisi pola perdagangan ini yang justru mengabadikan ketergantungan Indonesia pada sektor primer dan mengindikasikan hubungan perdagangan yang asimetris. Kelemahan ini menyisakan ruang untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana struktur perdagangan yang tidak setara ini membatasi optimalisasi keuntungan Indonesia.

Ketiga, sekelompok literatur justru menyoroti sisi negatif dan resistensi terhadap MEA. Jürgen Rüländ (2016), dalam “*Why (most) Indonesian businesses fear the Masyarakat Ekonomi ASEAN: struggling with Southeast Asia’s regional corporatism*”, memberikan perspektif kritis dengan berargumen bahwa MEA pada dasarnya adalah proyek “korporatisme regional” yang didominasi oleh aktor eksekutif pemerintah dan perusahaan besar (konglomerat). Melalui kerangka Representasi Kepentingan Regional, Rüländ menunjukkan bagaimana proses pembentukan MEA bersifat non-partisipatif dan mengabaikan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Analisisnya mengungkap akar ketakutan pelaku usaha Indonesia terhadap MEA, yang bersumber dari persepsi bahwa integrasi ini lebih menguntungkan kepentingan bisnis asing dan regional yang besar. Penelitian Rüländ berhasil mengidentifikasi asimetri

politik dalam tata kelola MEA, namun kurang menyentuh aspek ekonomi-struktural dari hubungan asimetris antar negara anggota.

Berdasarkan tinjauan di atas, terlihat sebuah celah penelitian yang jelas. Ketiga kelompok literatur tersebut—mulai dari yang optimistik, yang mengonfirmasi manfaat tanpa kritik, hingga yang kritis—belum sepenuhnya mengangkat aspek hubungan kekuasaan yang inheren dan tidak setara (*Asymmetric Interdependence*) yang membingkai interaksi Indonesia dalam MEA. Mereka menyentuh gejala-gejalanya (ketimpangan kualitas tenaga kerja, pola perdagangan primer-sekunder, dan dominasi aktor besar), namun belum menjadikannya sebagai fokus analisis utama dengan kerangka teoritis yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menjadikan konsep *Asymmetric Interdependence* karya Keohane dan Nye sebagai lensa sentral untuk secara sistematis menganalisis faktor-faktor penghambat optimalisasi kepentingan Indonesia. Dengan demikian, kontribusi tulisan ini terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai gejala ketidaksetaraan yang terfragmentasi dalam literatur terdahulu ke dalam sebuah analisis yang koheren dan teoretis mengenai posisi Indonesia dalam struktur ekonomi politik MEA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam kompleksitas fenomena sosial—dalam hal ini faktor-faktor penghambat optimalisasi kepentingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengeksplorasi hubungan statistik, penelitian kualitatif ini berfokus pada pembangunan argumentasi dan penjelasan yang kontekstual melalui interpretasi terhadap makna dan relasi konseptual dari berbagai sumber teks.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dari

dokumen-dokumen teks yang kredibel dan terpercaya. Sumber data diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Sumber Primer Kebijakan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN Blueprint 2025, laporan MEA Scorecard, serta peraturan dan perencanaan pembangunan nasional Indonesia (misalnya RPJMN).
2. Sumber Sekunder Akademis, yang meliputi karya-karya ilmiah seperti artikel jurnal, buku, dan paper dari think tank ternama yang relevan dengan topik MEA, integrasi ekonomi, dan daya saing Indonesia.
3. Sumber Pendukung Kontekstual, yaitu pemberitaan media terpercaya dan laporan dari lembaga internasional (seperti World Bank, Global Witness) yang digunakan untuk melacak dinamika aktual dan melengkapi analisis.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Melalui teknik ini, data dari berbagai sumber ditelaah secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang menjelaskan faktor-faktor penghambat. Proses interpretasi dalam analisis ini dipandu oleh kerangka konseptual Interdependensi Asimetris yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Konsep Interdependensi Asimetris dipilih karena memberikan lensa teoretis yang tepat untuk menganalisis hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota MEA lainnya, yang seringkali ditandai oleh ketidaksetaraan dalam tingkat ketergantungan. Dalam konteks ini, konsep tersebut dioperasionalisasikan untuk mengkaji posisi Indonesia dalam empat aspek utama: (1) hubungan asimetris dalam perdagangan barang, (2) asimetri dalam arus investasi asing langsung (FDI), (3) asimetri dalam pasar tenaga kerja terampil, dan (4) asimetri dalam integrasi rantai pasok global. Dengan demikian, kerangka konsep ini berfungsi sebagai landasan untuk membedah bagaimana struktur hubungan ekonomi yang tidak seimbang menjadi faktor penghambat pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun secara umum bisa dipahami bahwa MEA memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, namun hal tersebut tidak menafikan keberadaan hubungan asimetris antara Indonesia dengan negara ASEAN lain dalam konteks ekonomi sehingga sorotan yang lebih dalam diperlukan untuk menganalisis sebenarnya apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Indonesia dalam mengoptimalkan MEA untuk kepentingan nasionalnya. Untuk memudahkan analisis dan pemahaman, bagian ini akan dibagi menjadi empat bagian yang menggambarkan hubungan asimetris antara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya pasca MEA.

1. Asimetris Dalam Perdagangan Barang

Struktur ekonomi Indonesia yang bertumpu pada sumber daya alam tercermin dalam pola perdagangannya dengan negara-negara ASEAN. Komoditas tambang dan hasil perkebunan, baik dalam bentuk mentah maupun setengah jadi seperti lembaran karet dan ferronickel, masih menjadi andalan ekspor (Andronova, dkk, 2020). Meskipun demikian, pola perdagangan ini justru mengukuhkan hubungan yang asimetris dan menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan.

Contoh nyata dari asimetri ini dapat dilihat pada alur perdagangan dengan Thailand. Indonesia mengekspor ferronickel dan baja sebagai barang setengah jadi, yang kemudian diolah di Thailand menjadi baja nirkarat (*stainless steel*) bernilai tinggi dari peralatan dapur hingga suku cadang mesin ke Indonesia. Bahkan Thailand sampai membuat regulasi *anti-dumping* untuk komoditas baja yang diimpor dari Indonesia (Yieh Corp, 2022; Trading Economics, 2024). Pola ini mengungkap divisi kerja regional yang timpang: Indonesia berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara Thailand memegang peran sebagai pengolah dan pencipta nilai akhir. Dampaknya, perekonomian Indonesia menjadi sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas di pasar global sebagai akibat ketergantungan terhadap produksi barang

mentah yang bersifat tidak berkelanjutan, bukan barang jadi atau manufaktur. Setiap penurunan harga langsung berimbas pada merosotnya pendapatan ekspor, yang berpotensi memicu defisit perdagangan dan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Sebaliknya, negara seperti Thailand dan Vietnam (Andronova, dkk, 2020), yang ekonominya digerakkan oleh produk manufaktur bernilai tambah tinggi seperti elektronik dan otomotif, relatif lebih terlindungi dari guncangan tersebut. Harga produk mereka tidak hanya lebih stabil, tetapi juga cenderung meningkat seiring dengan inovasi teknologi dan kekuatan merek, sehingga memberikan resiliensi ekonomi yang lebih besar, sehingga produksi berbasis manufaktur yang dijalankan oleh Thailand dan Vietnam lebih berkelanjutan dibandingkan pola produksi mentah yang dijalankan oleh Indonesia.

Asimetri ini semakin terlihat dari tingkat daya ganti masing-masing pihak. Sebagai pemasok komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara, posisi Indonesia sangat lemah. Jika harga CPO Indonesia dinilai tidak kompetitif, pembeli dengan mudah dapat beralih ke Malaysia misalnya yang juga menghasilkan produk serupa, seperti yang terjadi pada tahun 2021 ketika India beralih kepada CPO dari Malaysia karena terjadi kenaikan harga CPO dari Indonesia yang diakibatkan oleh kebijakan perpajakan dan bea cukai (Reuters, 2021). Demikian pula, jika kebijakan hilirisasi mineral Indonesia dianggap terlalu restriktif, pasar global dapat mencari sumber nikel alternatif di Filipina, seperti yang terjadi pada tahun 2023 (Nguyen dan Liu, 2023).

Sebaliknya, posisi Thailand sebagai pusat perakitan otomotif (Medina, 2025) atau Vietnam sebagai hub manufaktur elektronik bersifat lebih strategis dan sulit digantikan. Memindahkan pusat produksi yang telah terintegrasi dengan ratusan pemasok lokal dan infrastruktur pendukung yang mapan merupakan langkah yang memerlukan biaya dan waktu sangat besar, sehingga tidak rasional untuk dilakukan dalam jangka pendek. Contohnya, Samsung yang menyatakan bahwa setengah dari produk

mereka diproduksi di Vietnam, bahkan Samsung berencana untuk menaikkan jumlah investasi di Vietnam dari 18 milyar dolar AS menjadi 20 milyar dolar AS (Nguyen, 2022). Begitu juga perusahaan besar lainnya seperti Mazda yang memiliki investasi di Thailand sebesar 150 juta dolar AS dalam bidang pengembangan kendaraan energi listrik (EV) (Medina, 2025).

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dengan mitra-mitranya di ASEAN masih dicirikan oleh interdependensi asimetris. Indonesia terjebak dalam peran sebagai penyedia bahan mentah dan barang setengah jadi yang nilainya rendah dan fluktuatif, sekaligus menjadi konsumen bagi produk akhir yang bernilai lebih tinggi dan tidak berkelanjutan. Pola ini tidak hanya memperlemah posisi tawar Indonesia, tetapi juga menjadi penghambat struktural bagi upaya transformasi ekonomi dan optimalisasi manfaat partisipasi Indonesia dalam MEA.

2. Asimetris Dalam Arus Investasi Langsung

Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah membentuk pola perekonomian yang bertumpu pada sektor ekstraktif. Konsekuensi logis dari struktur ekonomi ini adalah tingginya ketergantungan pada investasi, termasuk Investasi Asing Langsung (FDI), untuk mendorong pertumbuhan. Dalam konteks ASEAN, Singapura dan Malaysia konsisten menempati posisi sebagai investor terbesar Indonesia (BKPM, 2021), dengan Singapura menduduki peringkat pertama selama hampir dua dekade terakhir. Meskipun secara kuantitas investasi ini memberikan dukungan finansial, interaksi yang terbentuk bersifat asimetris, di mana posisi Indonesia cenderung sebagai pihak yang lebih bergantung, sehingga menghambat optimalisasi manfaat ekonomi jangka panjang. (Sari dan Amar, 2023; Ringkuangan, Masinambow, dan Tolosang, 2025)

Asimetri ini termanifestasi dalam dua pola investasi dominan. Pertama, investasi berorientasi ekstraktif. Investasi Singapura dan Malaysia banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor seperti pertambangan dan

perkebunan, yang pada hakikatnya berfokus pada pengambilan dan ekspor sumber daya alam, baik dalam bentuk mentah maupun setengah olahan (Sari dan Amar, 2023; Antara, 2025).

Pola investasi ini cenderung tidak membangun rantai nilai hilir yang terintegrasi di dalam negeri. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang maksimal justru direalisasikan di luar Indonesia, sementara perekonomian domestik tetap rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global (Anandhika, 2023; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, 2025). Praktik semacam ini pada dasarnya mengukuhkan posisi Indonesia dalam divisi kerja regional sebagai pemasok bahan baku (*primary supplier*) yang nilainya rendah dan fluktuatif, dibandingkan dengan produk manufaktur bernilai tinggi yang dihasilkan oleh negara-negara investor tersebut (Sari dan Amar, 2023).

Kedua, investasi berorientasi konsumtif. Selain di sektor ekstraktif, investasi khususnya dari Singapura, juga mengalir deras ke sektor yang menyasar pasar domestik Indonesia, seperti industri makanan dan minuman (F&B) waralaba, ritel, dan e-commerce (Invest Indonesia, 2023). Investasi model ini bersifat *market-seeking*, yang bertujuan menguasai pangsa pasar konsumen Indonesia yang besar, bukan untuk menciptakan basis produksi yang berorientasi ekspor atau transfer teknologi (Rüland, 2016; Rahayu dan Pasaribu, 2017; Fitriyani dan Andrian, 2024). Dampaknya, lapangan kerja yang tercipta umumnya berada pada level profesi dengan nilai upah yang tidak tinggi, seperti penjaga toko dan *booth F&B*, kurir, operator, dan pelayanan konsumen. Lebih strategis lagi, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan dari konsumsi dalam negeri akan terus-menerus direpatriasi ke investor asing, yang dapat memberatkan neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang.

Di sisi lain, derasnya investasi konsumtif ini menciptakan tekanan kompetisi yang tidak setara bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, yang kesulitan bersaing dengan skala ekonomi dan kekuatan modal perusahaan asing ditambah dengan

tuntutan untuk menyesuaikan dengan tren e-commerce yang menelan biaya promosi, distribusi serta administrasi melalui platform e-commerce milik korporasi asing, seperti Shopee, platform e-commerce milik Sea Group dari Singapura (Sea Group, 2019).

Berdasarkan pola investasi ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan investasi antara Indonesia dengan mitra utamanya di ASEAN berlangsung dalam kerangka interdependensi asimetris. Alih-alih mentransformasi struktur ekonomi Indonesia, arus modal tersebut justru mempertahankan status quo, di mana Indonesia tetap dalam posisi sebagai penyedia bahan mentah dan pasar konsumen. Kondisi ini memperlemah posisi tawar Indonesia, karena pilihan kebijakan ekonominya seringkali harus menyesuaikan diri dengan keinginan investor untuk tetap menarik modal, bukannya mampu mengarahkan investasi tersebut secara strategis untuk membangun ketahanan dan kemandirian industri nasional. Dengan kata lain, asimetri dalam arus modal ini menjadi penghambat struktural bagi Indonesia untuk memanfaatkan MEA guna melakukan lompatan ekonomi yang substantif.

3. Asimetris Dalam Pasar Tenaga Kerja Terampil

Mobilitas tenaga kerja Indonesia dalam kerangka MEA merepresentasikan sebuah paradoks yang mengungkap keadaan hubungan asimetris. Pada satu sisi, Indonesia merupakan salah satu pemasok utama tenaga kerja ke negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Namun, komposisi pekerja migran Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dan berketerampilan rendah, seperti pekerja perkebunan, asisten rumah tangga, dan buruh konstruksi. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi (valuasi) yang rendah, tetapi juga sarat dengan kerentanan, mulai dari tingkat upah yang minim hingga perlindungan hukum yang tidak memadai (Khanisa, dkk, 2016).

Sebaliknya, arus mobilitas tenaga kerja yang masuk (*inflow*) ke Indonesia dari negara-negara ASEAN tersebut justru didominasi oleh tenaga kerja profesional dan

terampil di sektor formal. Meskipun jumlahnya secara kuantitas lebih kecil, tenaga kerja asing ini menempati posisi-posisi strategis dengan pendapatan tinggi, seperti di bidang teknologi, keuangan, manajemen, dan konsultasi. Pola mobilitas yang timpang ini dimana Indonesia mengekspor tenaga kerja berbiaya rendah dan mengimpor tenaga kerja berbiaya tinggi menciptakan defisit kualitas (*quality deficit*) dalam pertukaran sumber daya manusia (Rahadi, 2016; Widiyana dan Djatmiko, 2019; Haryati, Lupikawaty, dan Yahya, 2019).

Fenomena ini merupakan manifestasi nyata dari interdependensi asimetris dalam aspek ketenagakerjaan. Oleh karena itu, klaim bahwa Indonesia diuntungkan oleh mobilitas tenaga kerja MEA karena tingginya angka pekerja yang bekerja ke luar negeri adalah klaim yang perlu ditinjau kembali. Realitasnya, hubungan ini justru mempertahankan status quo dan menghambat optimalisasi manfaat bagi Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari devisa pekerja migran tidak sebanding dengan hilangnya potensi nilai tambah dari tenaga kerja terampil dan terbatasnya proses alih pengetahuan (*knowledge spillover*) ke dalam negeri atau disebut sebagai fenomena *brain drain* (World Bank, 2017). Asimetri dalam mobilitas SDM ini bukan hanya sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan sebuah faktor penghambat fundamental yang mencerminkan ketertinggalan daya saing bangsa dan membatasi kemampuan Indonesia untuk naik dalam mata rantai nilai regional.

4. Asimetris Dalam Integrasi Rantai Pasok Global

Fenomena *Global Value Chain* (GVC) telah mentransformasi lanskap ekonomi global, di mana proses produksi suatu barang terfragmentasi dan tersebar di berbagai negara berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing (ASEAN, 2015). Dalam arsitektur GVC yang kompleks ini, posisi suatu negara—apakah di bagian hulu (*upstream*), tengah (*midstream*), atau hilir (*downstream*)—sangat menentukan nilai ekonomi yang berhasil ditangkapnya (Gereffi

dan Korzeniewicz, 1994; Gereffi, 2018; OECD). Sayangnya, dalam konteks integrasi dengan ASEAN dan ekonomi global, Indonesia konsisten menempati posisi hulu sebagai pemasok bahan mentah, sebuah posisi yang secara inherent rentan dalam hubungan interdependensi yang asimetris.

Realitas ini terlihat jelas dalam dua sektor strategis. Pertama, pada industri kendaraan listrik, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar global, mineral kunci untuk baterai (USGS, 2024). Namun, meski menanggung seluruh biaya ekologis dari aktivitas ekstraksi hingga harus mencemari perairan sekitar tambang nikel (Global Witness, 2025; Levitt, 2025), Indonesia belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan alam ini menjadi kedaulatan industri. Kebijakan hilirisasi, seperti pembangunan pabrik battery precursor dan battery cell, memang merupakan lompatan penting dari sekadar mengekspor bijih mentah. Namun, lompatan ini belum cukup untuk membalikkan asimetri. Nilai tambah dan kontrol teknologi tertinggi masih bertahan di genggamannya pemegang Hak Kekayaan Intelektual (IP) seperti CATL (Tiongkok) atau LG Chem (Korea), serta di pusat-pusat perakitan akhir (final assembly) seperti Thailand yang dijuluki "*Detroit of Asia*". Dengan demikian, Thailand sebagai manufacturing hub memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dan sulit digantikan. (Asian Transport Observatory & Urban Electric Mobility Initiative, 2023)

Kedua, pola serupa terulang dalam industri telekomunikasi, khususnya *smartphone*. Indonesia berperan sebagai penghasil mineral-mineral kritis seperti timah dan tungsten di provinsi Bangka Belitung (USGS, 2024), yang kemudian diekspor ke Vietnam untuk dirakit menjadi *smartphone* merek Samsung (Nguyen, 2022). Dalam konfigurasi GVC ini, nilai ekonomis terbesar terakumulasi pada aktivitas hilir yaitu merek (Samsung) dan efisiensi perakitan akhir (Vietnam). Sementara itu, nilai yang berhasil diraih Indonesia dari ekspor mineralnya sangat kecil dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan harga jual akhir sebuah *smartphone*. Lebih lanjut, posisi Indonesia

sebagai pemasok bahan baku bersifat sangat mudah digantikan (*highly replaceable*), karena Vietnam dapat dengan relatif mudah mencari sumber mineral alternatif dari negara lain jika dianggap kurang kompetitif.

Berdasarkan kedua deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi Indonesia dalam GVC ASEAN masih dicirikan oleh interdependensi asimetris yang mendalam. Pola ini mungkin menguntungkan dalam jangka pendek melalui penerimaan devisa dari ekspor, namun menciptakan kerentanan struktural jangka panjang. Posisi di pinggiran (*periphery*) GVC membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, keputusan strategis perusahaan multinasional, dan persaingan dengan pemasok bahan baku lain. Akibatnya, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk melakukan lompatan menuju aktivitas ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi, yang justru menjadi kunci dalam memaksimalkan keuntungan dari integrasi regional dan global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) selama satu dekade terakhir masih terhambat oleh struktur interdependensi asimetris yang menguntungkan mitra-mitra dagang utamanya di kawasan. Penelitian ini membuktikan bahwa asimetri bukan hanya terjadi dalam satu sektor, tetapi merasuk dalam empat pilar ekonomi strategis: (1) struktur perdagangan yang memosisikan Indonesia sebagai primary supplier komoditas mentah dan pengimpor produk manufaktur jadi, (2) arus investasi asing yang terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan konsumtif, bukan transformatif, (3) mobilitas tenaga kerja yang bercirikan ekspor pekerja informal dan impor talenta profesional, serta (4) integrasi dalam Global Value Chains (GVC) yang mengunci Indonesia di posisi hulu (upstream) dengan nilai tambah dan kontrol teknologi terendah.

Kondisi asimetris ini bukanlah fenomena kebetulan, melainkan konsekuensi dari ketergantungan struktural perekonomian Indonesia pada sektor ekstraksi sumber daya alam, yang diperparah oleh minimnya diversifikasi ekonomi dan lemahnya kapasitas inovasi industri hilir. Dampaknya, Indonesia hanya mendapatkan porsi keuntungan ekonomi yang relatif kecil, rendah, dan fluktuatif, sementara harus menanggung seluruh risiko ekologis dan kerentanan akibat gejolak harga komoditas global. Lebih lanjut, struktur ini menciptakan pasar tenaga kerja yang timpang, di mana lapangan pekerjaan yang tersedia didominasi oleh sektor berupah rendah dan berketrampilan minimal, sehingga memperlambat peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas SDM nasional.

Untuk membalikkan keadaan ini dan merebut posisi yang lebih setara dalam MEA, diperlukan sebuah transformasi ekonomi strategis yang berani dan konsisten. Pertama, Indonesia harus secara sistematis membangun dan menguasai rantai nilai hilir domestik yang terintegrasi. Kebijakan hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik pemrosesan dasar, tetapi harus didorong hingga ke tahap penguasaan teknologi inti, desain produk, dan pembangunan merek (branding) yang kuat. Dengan demikian, jumlah penduduk yang besar dapat bertransformasi dari sekadar potensi pasar konsumen menjadi basis produksi dan ekspor yang tangguh.

Kedua, transformasi tersebut mustahil terwujud tanpa fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Investasi besar-besaran dan fundamental dalam sistem pendidikan, pelatihan vokasi, serta riset dan pengembangan (R&D) merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing dalam mobilitas regional. SDM yang kompeten adalah kunci untuk memutus siklus ketergantungan pada tenaga kerja asing dan mendorong alih teknologi yang substantif.

Terakhir, menciptakan iklim investasi dan ekosistem inovasi yang kondusif adalah kunci pemungkas. Pemerintah perlu membangun trust (kepercayaan) melalui

kepastian hukum yang konsisten, birokrasi yang efisien, dan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Hanya dengan tata kelola yang baik, Indonesia dapat menjadi magnet bagi investasi berorientasi jangka panjang di sektor-sektor industri bernilai tambah tinggi, seperti teknologi hijau, ekonomi digital, dan manufaktur canggih. Dengan tiga langkah strategis ini, Indonesia tidak hanya akan mampu mengoptimalkan keuntungan dari MEA, tetapi juga membangun ketahanan dan kedaulatan ekonomi untuk menjawab tantangan global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adofianti Hermana, A., Fajrin, H. M., Reva, Y. N., & Saleh, M. Z. (2025). Dampak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di era globalisasi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 51–62.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3455>
- Asian Transport Observatory & Urban Electric Mobility Initiative. (2023, Oktober). Thailand e-mobility country profile [PDF].
https://asiantransportobservatory.org/documents/65/Thailand_20231002.pdf
- Anandhika, M. R. (2023, June 16). International economic engagement can support Indonesia's industrial upgrade. *The Jakarta Post*.
<https://www.thejakartapost.com/paper/2023/06/16/international-economic-engagement-can-support-indonesias-industrial-upgrade.html>
- Andronova, I., Gusakov, N., Digilina, O., Dyuzheva, N., & Kuchma, N. (2019). Position of Vietnam, Indonesia, and Malaysia in the competition for attracting FDI. In *New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development* (Advances in Economics,

- Business and Management Research, Vol. 131). 2502-3136; e-ISSN: 2502-3128. <http://lamlaj.ulm.ac.id/>
- Apresian, S. R. (2016, Juli–Desember). Arus bebas tenaga kerja dalam era masyarakat ekonomi ASEAN: Ancaman bagi Indonesia? *Indonesian Perspective*, 1(2), 15–29.
- Masyarakat Ekonomi ASEAN. (2025). *Masyarakat Ekonomi ASEAN blueprint 2025*. Jakarta, Indonesia: [Publisher jika ada]. ISBN 978-602-0980-59-1
- Bername-ANTARA. (2025, August 8). Singapore, China and Malaysia dominate the foreign investment market in Indonesia. The Star. <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2025/08/08/singapore-china-and-malaysia-dominate-the-foreign-investment-market-in-indonesia>
- BKPM (Capital Investment Coordinating Board) Indonesia. (2021). *Development of foreign direct investment in Indonesia*.
- Desi Fitriyani, D., & Andrian, T. (2024). Analysis of factors affecting foreign direct investment (FDI) in Indonesia. *Lafadz Jaya Publisher*, 2(3), 431–438. ISSN: 2988-7615
- Energy and Mineral Resources Minister Bahlil Lahadalia. (2025, October 15). Energy minister says Indonesia's raw-material exports mainly benefit other countries. *Asia-Pacific Solidarity Network*. https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-10-15/energy-minister-says-indonesias-raw-material-exports-mainly-benefit-other-countries.html?utm_source=chatgpt.com
- Evelina, S., & Lie, G. (2025, March–August). Direct distribution regulation by foreign direct investment in the trade sector: A comparative study between Indonesia and Singapore. *LamLaj*, 10(1), 83–96. ISSN: 2502-3136; e-ISSN: 2502-3128. <http://lamlaj.ulm.ac.id/>
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.
- Gereffi, G., & Korzeniewicz, M. (1994). *Commodity chains and global capitalism*. Westport, CT: Praeger.
- Global Witness. (2025, October 15). Clean energy, dirty consequences: Mining for renewable technologies linked to global social unrest [Press release]. <https://globalwitness.org/en/press-releases/clean-energy-dirty-consequences-mining-for-renewable-technologies-linked-to-global-social-unrest/>
- Haryati, V. R., Lupikawaty, M., & Yahya, Y. (2019, December). Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap elemen tenaga kerja terdidik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 99–108. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9508>
- Herdiansah, D. (2017, Februari). Implementasi MEA blueprint di Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal*, 1(2), 1–10. ISSN: 2528-3928
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Pearson. ISBN-13: 978-0-205-08291-9
- Khanisa, T. N. P., Salim, Z., Febiyansah, P. T., Luhulima, C. F. P., Inayati, R. S., Yustiningrum, E., & Kusumaningtyas, A. N. (2016, Juni). Strategy to increase public understandings about Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 1–15.
- Levitt, T. (2025, April 30). Company supplying critical EV metal 'did not disclose' Erin Brockovich pollutant in

- drinking water. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2025/apr/30/environment-water-pollution-green-transition-indonesia-harita-nickel-metal-mining-electric-vehicles-erin-brockovich-chromium-cr6>
- Medina, A. F. (2025, June 26). Thailand's role in ASEAN supply chains: Reshoring, realignment, and risk mitigation. ASEAN Briefing. <https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-and-role-in-asean-supply-chains-reshoring-realignment-and-risk-mitigation/>
- Nguyen, D. (2022, December 31). Vietnam emerges as high-tech manufacturing hub. VnExpress International. <https://e.vnexpress.net/news/economy/vietnam-emerges-as-high-tech-manufacturing-hub-4554830.html>
- Nguyen, M., & Liu, S. (2023, August 30). Indonesian nickel smelters turn to Philippines for ore as local supply tightens. Reuters. <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesian-nickel-smelters-turn-philippines-ore-local-supply-tightens-2023-08-30/>
- Nguyen, P. (2022, August 4). Exclusive: Samsung workers in Vietnam bear brunt of slowdown in global demand for electronics. Reuters. <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/exclusive-samsung-workers-vietnam-bear-brunt-slowdown-global-demand-electronics-2022-08-04/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). SME trade, GVCs and competition. <https://www.oecd.org/en/topics/sme-trade-gvcs-and-competition.html>
- Rahayu, I. T., & Pasaribu, E. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi foreign direct investment (FDI) di enam koridor ekonomi Indonesia: Market seeking atau resource seeking? Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik, 9(1), 1–12. ISSN: 2086-4132
- Reuters. (2021, December 2). Top buyer India to favour Malaysian palm oil as Indonesian prices rise – assoc. <https://www.reuters.com/markets/commodities/top-buyer-india-favour-malaysian-palm-oil-indonesian-prices-rise-assoc-2021-12-02/>
- Ringkuangan, S., Masinambow, V. A. J., & Tolosang, K. D. (2025, April). Analisis pengaruh investasi asing langsung (China, Singapura, Jepang) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 25(2), 27–36.
- Rüland, J. (2016). Why (most) Indonesian businesses fear the Masyarakat Ekonomi ASEAN: Struggling with Southeast Asia's regional corporatism. Third World Quarterly, 37(3), 456–470. <http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.1133245>
- Sari, R. N., & Amar, S. (n.d.). The effect of international economic variables on Singapore foreign direct investment in Indonesia. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-158-6_9
- Sea Group. (2019, September 3). Shopee opens new regional headquarters; commits to innovate and invest in Singapore and the region [Press release]. <https://cdn.sea.com/webmain/static/resource/seagroup/pressrelease/2019-09-03%20Shopee%20Opens%20New%20Regional%20Headquarters%3B%20Commits%20to%20Innovate%20and%20Invest%20in%20Singapore%20and%20the%20Region/2019-09-03%20Shopee%20Opens%20New%20Regional%20Headquarters%3B%20Commits%20to%20Innovate%20and%20Invest%20in%20Singapore%20and%20the%20Region>

0in%20Singapore%20and%20the%20Reg
ion%20.pdf

Trading Economics. (n.d.). Thailand imports from Indonesia of nickel. Retrieved November 3, 2025, from <https://tradingeconomics.com/thailand/imports/indonesia/nickel>

U.S. Geological Survey. (2024). Mineral commodity summaries 2024: Nickel [PDF]. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>

Wardoyo. (n.d.). Masyarakat ekonomi ASEAN: Harapan dan tantangan bagaimana daya saing Indonesia di ASEAN. [Nama Jurnal], 61(2), 79–87. ISSN: 2302-3449, e-ISSN: 2580-9490

World Bank. (2017). Indonesia migration and remittances review [Report]. The World Bank.

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/126981510403669497/indonesia-migration-and-remittances-review>

Yieh Corporation. (2022, December 5). Thailand decides to impose anti-dumping duty on cold-rolled stainless steel from Malaysia & Indonesia.

<https://yieh.com/en/News/thailand-decides-to-impose-ad-duty-on-cold-rolled-stainless-steel-from-malaysia-indonesia//138036>